



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IHSAN HENDRAWAN
2. Jabatan : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 687291

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.340.000.000

1. Tanah Seluas 19.838 m2 di KAB / KOTA TULANG BAWANG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 690.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/104 m2 di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 256.000.000

1. MOTOR, HONDA RODA DUA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS RODA EMPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
3. MOTOR, HONDA RODA DUA Tahun 2016, LAINNYA Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 75.415.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 102.361.709

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.773.776.709

III. HUTANG

Rp. 168.906.123

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.604.870.586



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.